

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. UII Press. Yogyakarta.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. PT Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta.
- Adam Chasawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Bambang Marhijanto. 2004. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*. Bintang Ilmu. Surabaya.
- Faisal Sanapia. 1980. *Sosiologi*. Bina Ilmu. Surabaya.
- G. H. S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan V. Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- Habib Adjie. 2011. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Cetakan Kesatu. Refika Aditama. Bandung.
- Habib Adjie. 2014. *Hukum Notaris Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Hans Kelsen. 2014. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, General Theory Of Law and State, Terjemahan Raisul Muttaqien*. Nusa Media. Bandung.
- Jabrohim. 2004. *Menggapai Desa Sejahtera Menuju Masyarakat Utama*. Pustaka Pelajar Lembaga Pengembangan Masyarakat UAD. Yogyakarta.

- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius. Yogyakarta.
- M.H. Tirtaamidjaya. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Penerbit Fasco. Jakarta.
- Moegni Djojodiharjo M.A. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet.2, PT. Citra Aditya. Bandung.
- Moeljat Nomor Asas-asas Hukum Pidana, Cet.7. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Group. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Penada Media Grup. Jakarta.
- Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. 1985. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Liberty. Yogyakarta.
- Philipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu Surabaya. Surabaya.
- Putu Vera Purnama Diana. 2016. *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak*. Universitas Udayana. Bali.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 2002. *Hukum Notarial Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali. Jakarta.
- R Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sri Mamudji. 2007. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Penulis Universitas Indonesia. Jakarta.
- Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, cetakan I. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Utrecht E 1994. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.

JURNAL

- Bahder Johan Nasution. 2020. Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris", *Recital Review*. Universitas Jambi. Jambi.
- Dwikky Bagus Wibisono dan Umar Ma'ruf. 2018. Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Akta*. Vol 5 No 1. UNNISULA. Semarang.
- Irma Mulia Sari, Ilyas Ismail, Suhaimi. 2019. Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur. *Syiah Kuala Law Journal*. Vol. 3, Nomor1. Universitas Syiah Kuala. Aceh.
- Ria Trisnomurti dan I Gusti Bagus Suryawan. 2017. Tugas Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris. *Jurnal Notariil*. Vol. 2, Nomor 2. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Risdalina. 2015. Manfaat Dan Jangka Waktu Penahanan Sementara Menurut Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 03. Nomor 01.
- Roeslan Saleh. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru. Jakarta.
- Syamsir, Elita Rahmi, and Yetniwati. 2018. Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris. *Recital Review*. Universitas Jambi. Jambi.
- Wiratni Ahmadi. 2000. *Pendidikan Magister Kenotariatan*. makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran. Bandung.

TESIS

- Anita Saprina. 2017. *Analisis Yuridis Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Karena Sedang Menjalani Masa Penahanan*. Tesis. Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Fenny Sandra Lisa. 2018. Sanksi Pemberhentian Sementara Notaris Yang Dinyatakan Dalam Proses Pailit", *Jurnal Repertorium* – Vol.7 Nomor2, November 2018.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris